

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Studi Hubungan Internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor non-state untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (Non-Governmental Organization), IGO (Inter-Governmental Organization), MNC (Multi National Cooperation) bahkan individu juga memiliki power dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan bekerja sama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011: 138).

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah lingkungan hidup.

Menurut Greene, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. Yang pertama, beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Contohnya jika pembuangan limbah dilakukan di

laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. Yang ketiga, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. Yang keempat, meskipun permasalahannya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. Yang kelima, permasalahan lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik (Greene, 2001:387-414).

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negaranegara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negaranegara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekologi (Wyasa, 2003:3). Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies.

Gajah Sumatera adalah sub-spesies gajah Asia, dan semua gajah Asia digolongkan sebagai satwa yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis oleh Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Ancaman utama bagi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan dan disusul akibat perburuan, serta perdagangan liar. Hingga saat ini diketahui bahwa 85% populasi gajah di Sumatera berada diluar kawasan konservasi. Kondisi ini menyulitkan para pengelola untuk melakukan manajemen konservasi gajah karena adanya tumpang tindih kegiatan dan perbedaan usulan alokasi peruntukan lahan dari pihak-pihak lain.

Jika dilihat di negara Afrika subspecies dari gajah Afrika, tim *Wildlife Conservation Society* menemukan bahwa dibutuhkan lebih dari 20 tahun bagi gajah hutan betina untuk mulai bereproduksi. Sedangkan, jangka waktu rata-rata kelahiran adalah antara 5-6 tahun. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, antara tahun 2002 dan 2013, populasi gajah hutan (Afrika) anjlok sebesar 65%. Pemulihan dari penurunan populasi tersebut membutuhkan waktu lebih dari 90 tahun. Berdasarkan perkiraan populasi dari sumber yang cukup luas, termasuk survei dari udara dan penghitungan kotoran, maka jumlah gajah di Afrika tahun 2015 berkurang 93.000 ekor daripada d tahun 2006.

Diperkirakan saat ini jumlah gajah di benua ini ada tinggal sekitar 415.000 ekor kendati masih ada sekitar 117.000 sampai 135.000 ekor gajah yang tidak terhitung lewat sistem. Perburuan gading gajah yang dimulai pada dekade lalu, terburuk pada tahun 70-an dan 80-an, menjadi penggerak utama dari menurunnya angka populasi gajah. Ini menyebabkan ancaman serius jangka panjang untuk spesies tersebut (Xinhua, 2016). Dapat dibandingkan bahwa tingkat kepunahan akibat perburuan sangatlah besar di Indonesia yang menyebabkan Gajah Sumatera yang hingga kini diperkirakan kurang lebih tinggal 1700an ekor di seluruh Sumatera.

Dalam tujuh tahun terakhir, konflik antara manusia, pembangunan ekonomi, serta gajah Sumatera dan Kalimantan meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, dalam upaya menyelesaikan permasalahan gajah di Indonesia, pemerintah dan para pihak terkait termasuk pemerhati gajah melakukan kajian dan menetapkan strategi dan rencana aksi konservasi gajah Indonesia. Melindungi kawasan hutan yang tersisa merupakan hal yang sangat penting agar kelangsungan hidup populasi gajah dapat terus berlanjut. Koridor-koridor satwa liar dalam kawasan hutan harus dipertahankan atau diciptakan kembali sehingga dapat menyediakan wilayah yang aman bagi gajah untuk memperoleh sumber-sumber makanan baru dan berkembang biak.

WWF menghimbau pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh konversi hutan alam habitat gajah Sumatera sampai strategi konservasi ditentukan untuk pelestarian satwa tersebut. WWF juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan penilaian awal guna menentukan wilayah-wilayah habitat yang besar dan menetapkannya sebagai kawasan dilindungi. Selanjutnya, kawasan habitat yang lebih kecil perlu dihubungkan dengan koridor-koridor konservasi. WWF menghimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah, perusahaan kelapa sawit, perusahaan pulp dan kertas serta organisasi konservasi untuk bekerja bersama melestarikan gajah dan habitatnya di Sumatera. Dibutuhkan tindakan-tindakan nyata untuk melindungi hutan alam Sumatera yang tersisa agar generasi Indonesia di masa yang akan datang dapat mewarisi kekayaan alam, khususnya gajah dan satwa besar lain seperti harimau, orangutan dan badak di alam (WWF, 2009)

World Wide Fund for Nature (WWF) adalah sebuah organisasi non pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan, dulunya bernama World Wild life Fund dan masih menjadi nama resmi di Kanada dan Amerika Serikat. WWF adalah organisasi konservasi independen terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara, mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan.

Gading adalah benda dari satwa gajah yang paling sering diperdagangkan, walaupun gigi dan tulang juga umum diperdagangkan. Kerajinan gading adalah simbol status penting bagi warga kelas ekonomi menengah di negara-negara industri Timur Jauh seperti Tiongkok dan Jepang (Wasser Ibid hal-34). Gading sering kali diolah menjadi perhiasan, pernak pernik, oleholeh, hadiah dan sumpit ukiran, ornamen, aksesoris rambut, dan banyak benda lainnya. Tidak jelas sejauh mana gading dari Indonesia memasok permintaan pasar domestik (contohnya pipa rokok, berdasarkan komunikasi pribadi dengan staf WCU, 2015), dibandingkan permintaan internasional.

WWF Indonesia didirikan pada tahun 1962, kurang dari setahun setelah WWF Internasional didirikan. Selama lebih dari 33 tahun, WWF Indonesia telah bekerjasama dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah, universitas dan para pemuka masyarakat, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di Indonesia. Ini punya arti penting karena Indonesia adalah wilayah yang secara hayati paling beranekaragam di dunia. Dengan 17.000 pulau dan populasi penduduk sebesar 210 juta, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang hampir tak tertandingi di planet ini. Indonesia juga menjadi kediaman lebih dari 500 spesies mamalia, dan memiliki species reptil hampir dengan jumlah yang sama. Pada akhirnya, kegiatankegiatan ini menjadikan WWF Indonesia sebagai Kantor Program (Program Office) WWF yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik dan kini telah menjadi organisasi nasional di Indonesia.

Gajah Sumatera merupakan *flagship species* yang memerlukan kegiatan konservasi secara efektif untuk mempertahankan kelestariannya (Alikodra 2012). Gajah Sumatera tergolong satwa terancam punah (*endangered*) dalam daftar Red

List Data Book yang dikeluarkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) (IUCN, 2012 dalam Riba'I et al. 2012). Selain itu Gajah Sumatera juga terdaftar dalam Apendiks I CITES (*Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yaitu jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah (Suyastri, 2012).

Masuknya gajah Sumatera dalam daftar tersebut disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, penyusutan dan fragmentasi habitat, serta pembunuhan akibat konflik dan perburuan. Perburuan biasanya hanya mengambil gadingnya saja, sedangkan sisa tubuhnya dibiarkan membusuk di lokasi. Selagi hutan masih dibabat, nasib gajah Sumatera semakin sekarat. Keberadaan hewan dilindungi ini semakin tersisih. Sesekali, gajah Sumatera pernah juga mengamuk dan merusak tanaman perkebunan yang dulunya sebagai tempat tinggal mereka. Diperkirakan, populasi gajah Sumatera yang semakin menurun karena habitatnya terus menyusut dan pembunuhan yang terus terjadi.

Upaya yang dilakukan WWF Indonesia dalam menangani konservasi gajah yaitu WWF bekerja di tiga wilayah di Sumatera yang dinilai sangat penting bagi upaya konservasi gajah. Terobosan-terobosan besar telah berhasil dicapai dengan dideklarasikannya Taman Nasional Tesso Nilo di Riau (tahap I seluas 38,576 ha) oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Menteri Kehutanan menetapkan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera melalui Permenhut No. 5/2006. Hal ini merupakan langkah besar bagi penyelamatan habitat gajah di Sumatera.

Pada tahun 2004, WWF memperkenalkan Tim Patroli Gajah Flying Squad pertama di Desa Lubuk Kembang Bunga yang berada di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo yang baru ditetapkan. Tim ini, yang terdiri dari sembilan pawang dan empat gajah latihan, mengarahkan gajah-gajah liar untuk kembali ke hutan apabila mereka memasuki ladang maupun kebun milik masyarakat desa tersebut. Sejak mulai beroperasi, Tim Flying Squad Tesso Nilo berhasil mengurangi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat setempat yang timbul akibat serangan gajah dan mencegah pembunuhan gajah akibat konflik.

Tabel 1. Jumlah Kematian Gajah di Riau 2004-2013



Sumber data, WWF-Indonesia

WWF bersama BKSDA dan BTNTN melakukan monitoring di 2 kantong gajah yang terdapat di kawasan Tesso Nilo dengan menggunakan SIG (*System Informasi Geografis*) untuk melihat keberadaan gajah-gajah di kawasan Tesso Nilo, sekurangnya 2 kelompok gajah hidup dengan rata-rata satu kelompok gajah berjumlah 50 – 100 individu. Jumlah individu dalam kelompok gajah dapat terlihat di satu jalur jelajah di wilayah konsesi PT. Rimba Lazuardi di sebelah Selatan-Timur Tesso Nilo (di luar kawasan taman nasional) dan jalur jelajah di wilayah Gunung Saelan untuk clan lainnya. Laporan hasil terbaru dilaporkan 58 individu terlihat dan terhitung di wilayah konsesi Rimba Lazuardi di bulan Mei 2009 (Desai & Samsuardi:2009).

Selain itu akibat penutupan hutan, memberikan ancaman yang besar bagi habitat dan populasi gajah Sumatera. Menurut laporan Departemen Kehutanan menyebutkan 65 % populasi gajah sumatera lenyap akibat dibunuh manusia. Sekitar 30 % pembunuhan dilakukan dengan racun (<http://lipsus.kompas.com>). Gajah Sumatera merupakan sub spesies dari gajah asia Penyebaran gajah asia di Indonesia terdapat di kepulauan sumatera dan Kalimantan bagian timur.

Berdasarkan ordonansi perlindungan binatang liar nomor 134 dan 226 Tahun 1951 gajah merupakan satwa liar yang dikhawatirkan akan punah sehingga secara resmi telah dilindungi sejak 1951. Kemudian diperkuat dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 234/Kpts/Um/1972. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta menurut Peraturan Perundangan RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa gajah merupakan satwa langka. Dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*), dengan upaya pengawasan perdagangan satwa lintas negara, maka semua jenis gajah termasuk dalam daftar Appendix 1. Apendik I berisi daftar spesies yang terancam punah, dimana jumlah populasinya di alam sangat sedikit. Perdagangan komersial dari spesies-spesies Apendik I sangat tidak diperbolehkan. Diadakannya kontrol perdagangan dan menjaga serta memperbaiki ekosistem sangat diperlukan. (<http://alamendah.org>)

Berdasarkan laporan Departemen Kehutanan tahun 2007, sekitar 83% habitat Gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. Daerah jelajah yang sempit mengakibatkan berkurangnya gajah dalam mencari makan. Gajah mempunyai daerah jelajah (*home range*) 32,4 - 166,9 km² yang meliputi berbagai tipe ekosistem hutan yaitu hutan rawa, hutan hujan dataran rendah, hutan gambut, dan hutan hujan dataran pegunungan. Kondisi hutan dan lingkungan yang semakin rusak maka habitat gajah juga termasuk dalam lingkungan dimana manusia bertempat tinggal. Hutan bagian dari lingkungan merupakan habitat berbagai satwa dan flora sebagai sumber pakan bagi satwa (Maharani, 2012).

Khusus untuk di wilayah Riau dalam seperempat abad terakhir ini estimasi populasi gajah Sumatera, yang telah lama menjadi benteng populasi gajah, menurun sebesar 84% hingga tersisa sekitar 210 ekor saja di tahun 2007. Lebih dari 100 individu gajah yang sudah mati sejak tahun 2004. Ancaman utama bagi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, perburuan dan perdagangan liar.

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan laju deforestasi hutan terparah di dunia dan populasi gajah berkurang lebih cepat dibandingkan

jumlah hutannya. Untuk mengatasi permasalahan semakin menyusutnya jumlah hewan dilindungi ini, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadap pelaku perusak dan pembalakan liar. Tanpa sadar, upaya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan telah menggusur gajah Sumatera untuk mencari tempat hidup yang baru.

Untuk memitigasi konflik manusia dan gajah, sejak Juli 2009, WWF-Indonesia bekerjasama dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, serta Forum Komunikasi Mahout Sumatera (FOKMAS) melakukan pemasangan GPS Satellite Collar. Alat ini dipasang pada Gajah liar untuk mengetahui keberadaan sebagai upaya monitoring keberadaan dan pergerakannya, dan sebagai peringatan dini untuk mitigasi konflik Gajah sehingga dapat mencegah masuknya Gajah liar ke area pemukiman atau perkebunan sehingga dapat meminimalkan konflik antara Gajah dan manusia.

Roadshow bertujuan mensosialisasi kepada stakeholder terutama pemerintah kabupaten tentang kondisi gajah sumatera, dan juga untuk mendorong masukan-masukan dari kabupaten-kabupaten untuk dibawa ke dalam workshop penyusunan strategi konservasi gajah tingkat propinsi yang akan dilaksanakan pada awal 2010. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi gugus tugas penyelamatan gajah sumatera dan upaya mitigasi konflik di Riau. Berbagai permasalahan utama terungkap dari hasil pertemuan tersebut yaitu permasalahan habitat gajah yang terus mengalami penurunan akibat pembukaan lahan terutama untuk kebun sawit dan konsesi HTI, tumpang tindih lahan termasuk tumpang tindih kebijakan areal konsesi dan lemahnya tindakan hukuman bagi para pelanggar lahan, penjualan lahan hutan kepada pendatang, konflik manusia -gajah di beberapa tempat termasuk opini klasik masih menempatkan gajah pada posisi yang lebih tinggi diperhatikan dibandingkan manusia dan koordinasi stakeholder yang belum kuat dalam perlindungan Gajah Sumatera. (<http://awsassets.wwf.or.id/tessonilo2009>)

IUCN juga mengutip beberapa studi yang menunjukkan bahwa paling tidak enam kawan gajah lenyap pada kurun waktu 2007-2009 di Provinsi Riau yang sarat dengan industri kertas dan kelapa sawit. Hilangnya hutan lindung yang

menjadi habitat gajah menyebabkan gajah keluar dari habitat, sehingga meningkatkan ancaman konflik dengan manusia. Hilangnya habitat Gajah ditengarai disebabkan oleh pembakaran hutan, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Sumatera telah menjadi salah satu wilayah dengan pembabatan hutan terburuk dunia. Kelompok konservasi mengatakan pulau Indonesia telah kehilangan lebih dari dua pertiga dari hutan dataran rendah, yang merupakan habitat paling cocok untuk gajah (IUCN, 2012).

Dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2016) tercatat 87 ekor gajah mati di Riau yang sebagian besar dikarenakan konflik dan perburuan. Namun hanya dua kasus kematian gajah yang akhirnya dipersidangkan yakni kasus perburuan empat ekor gajah oleh tujuh pelaku perburuan gading gajah. Pengungkapan kasus selama ini berjalan lambat dan hampir tanpa hasil. Penegakan hukum juga tidak cukup menjerakan pelaku. Ironisnya, upaya pencegahan di lapangan masih minim. Pengabaian negara atas ruang hidup serta lemahnya penegakan hukum mempercepat laju satwa kunci Sumatera tersebut menuju kepunahan.

Dampak pengurangan terbesar pada keberadaan populasi gajah di alam selain karena adanya perburuan, juga disebabkan oleh semakin berkurangnya luasan habitat gajah. Pengurangan habitat gajah secara nyata ini karena berubahnya habitat gajah sumatera menjadi perkebunan monokultur skala besar (sawit, karet, dan kakao) yang telah menggusur habitat gajah sumatera. Selain itu, hal ini juga telah membuat gajah terjebak dalam blok-blok kecil hutan yang tidak cukup untuk menyokong kehidupan gajah untuk jangka panjang, di sisi lain hal ini juga yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara manusia dengan gajah. Untuk itu, perlu adanya penanganan khusus terutama untuk menghindarkan gajah dari kepunahan dan juga konflik dengan manusia (Suara Satwa, 2008).

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kerjasama WWF (World Wide Fund For Nature) dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus kepunahan gajah di Sumatera periode 2009-2015?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Kerjasama WWF dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus kepunahan gajah di Sumatera periode 2009-2015.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini memberikan suatu keterangan dan informasi dalam ilmu hubungan internasional untuk memahami program WWF yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia tujuannya untuk mengatasi permasalahan kepunahan gajah di Sumatera.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai upaya serta peran Pemerintah dalam kasus kepunahan gajah di Sumatera.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas mengenai letak signifikansi penelitian terlebih dahulu dengan topik bahasan dalam penelitian ini yang berjudul **“Kerjasama WWF (World Wide Fund For Nature) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus Kepunahan Gajah di Sumatera periode 2009-2015”** sebagai berikut:

Dalam skripsi penelitian yang berjudul **“Implementasi program WWF (World Wide Fund For Nature) Dalam Menangani Kasus Perburuan Liar Harimau Sumatera Di Indonesia”** yang ditulis oleh Nurrahma Kusuma Putri. Melihat kondisi gajah sumatera yang terus - menerus mengalami perburuan liar, maka WWF kemudian melakukan program untuk mendesak pemerintah agar segera menghasilkan kebijakan yang mendukung pelestarian dan kemanan untuk

satwa langka termasuk gajah. WWF juga melakukan upaya - upaya di bidang advokasi, monitoring, fasilitasi, dan konsultasi.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal ini membahas mengenai perburuan liar yang menjadi titik fokusnya, serta mengenai alasan mengapa perburuan liar terjadi secara ilegal. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai program WWF dalam mengatasi kasus kepunahan gajah di Indonesia yang tidak hanya terfokus pada perburuan liarnya saja melainkan terhadap permasalahan kepunahan itu sendiri di balik adanya perburuan liar, sehingga kedepannya pemerintah dapat merealisasikan dan menjalankan fungsi negara dalam melindungi satwa langka atau makhluk hidup yang dimiliki bangsa sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Selanjutnya ada Skripsi Penelitian yang ditulis oleh Eca Khairunnisa mengenai "**Peranan World Wide Fund For Nature dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia**". Upaya yang dilakukan oleh WWF Indonesia dalam upaya konservasi badak jawa yaitu dengan membuat program RhinoCare. Program RhinoCare adalah program penyebarluasan informasi dan penggalangan dana konservasi untuk spesies badak jawa. Aksi konservasi ini termasuk monitoring populasi, pengamanan dan perlindungan populasi dan habitatnya, pengelolaan habitat dan riset-riset pendukung badak jawa.

Perbedaan penulisan yang penulis buat dengan artikel di atas yaitu dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama yaitu kepunahannya saja berbeda pada kasus satwanya yaitu populasi badak jawa di Indonesia. Peneliti yang bersangkutan meneliti bagaimana melalui kerjasama dengan Indonesia, WWF membuat upaya melalui berbagai program yang dirancang bersama Indonesia untuk menjaga kelestarian populasi badak di Ujung Kulon. Penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh WWF sebagai organisasi internasional dalam kerjasamanya dengan Indonesia dalam usaha pelestarian badak jawa. Sedangkan penulis menambahkan akan adanya implementasi terhadap program WWF untuk menangani kasus kepunahan gajah di Indonesia.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah sebuah jurnal yang berjudul "**Peran World Wide Fund For Nature (WWF) dalam**

Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau” yang dibuat tahun 2014 oleh Syarifatul Zannah, Universitas Mulawarman. Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan WWF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dalam melaksanakan program kerjanya di Taman Nasional Tesso Nilo prihatin dengan isu-isu lingkungan, terutama kepunahan gajah. Berdasarkan situasi ini, WWF Indonesia dan Konservasi Gajah Riau membuat strategi penyelamatan gajah di Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nilo adalah 86.932 hektar Taman Nasional cadangan untuk gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus* Temminck) habitat alami. Secara umum, populasi gajah sumatera telah menurun setiap tahun karena habitat yang kurang bagi mereka sebagai perubahan penggunaan lahan untuk permukiman dan perkembangan non-kehutanan terus berlanjut. Faktor habitat merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen Nation Park. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa WWF telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional, dimana WWF yang bertindak sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap sumber daya hayati dan ekosistem khususnya kehidupan gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.

Perbedaan penulisan yang penulis buat dengan artikel di atas yaitu dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama yaitu terdapat pada periode kasus yang dibahas ini merupakan kasus tahun 2004-2007 sedangkan penulis melakukan penelitian kasus kepunahan Gajah Sumatera periode 2009-2015 yang terdapat peningkatan kepunahan spesies Gajah. Penulis juga lebih menjabarkan akan keterkaitan kerjasama WWF dengan Pemerintah Indonesia .

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis suatu permasalahan konsep yang digunakan yaitu Teori kerjasama International INGO dan WWF. Adapun penjabaran teori adalah sebagai berikut:

I.6.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah suatu atau banyak instrumen atau pelaku hubungan instrumen internasional itu sendiri. Khusus dalam tulisan ini organisasi internasional, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam bab ini, merupakan salah satu bentuk wadah yang berfungsi sebagai penetap tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai atau dipenuhi dengan kerjasama dalam berbagai bidang ilmu yang menentukan hajat hidup masyarakat dunia yang hakiki.

Sugiono melalui Hadiwinata dalam “Politik Bisnis Internasional” menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional yakni:

1. Negara bukan lagi aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kebudayaan bersama dengan aktor ekonomi dan sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Melainkan juga oleh institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang beragam dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (2006:2).

Faktor di atas menyatakan bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam politik internasional karena sekarang sudah banyak aktor-aktor lain seperti individu dan organisasi internasional yang bergantung atau tidak bergantung pada pemerintah negara masing-masing yang bebas melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingannya sendiri yang entah sejalan atau kurang sejalan dengan kepentingan negara asalnya dalam konteks ekonomi, dalam jangka waktu yang akan habis jika kepentingan ekonomi tersebut telah tercapai.

Jika pencapaian tersebut terjadi maka kerjasama bisa saja benar-benar berhenti atau hanya fokus kerjasama itu sendiri yang berubah. Dalam tulisan ini kerjasama internasional dalam bidang lingkungan hidup biasanya bersifat hampir selalu berjalan dengan kepentingan pemerintah dan tidak akan pernah habis karena lingkungan hidup memerlukan kepedulian tiada akhir dari manusia yang hidup di bumi ini.

Kerjasama internasional ini ditentukan oleh wadah macam apakah yang bertujuan memenuhi kepentingan di bidang apa pula. Dengan kata lain tidak ada wadah yang mampu menjadi tempat pergumulan semua kepentingan atau masalah dari semua bidang yang menjadi urgency negara-negara di dunia ini.

Kerjasama internasional masa kini sudah dilakukan oleh berbagai aktor yang memiliki berbagai agenda pribadi. Fenomena ini dinyatakan Chandler dalam “Constructing Global Civil Society: Morality and Power in International Relations” yakni:

“Saat ini aktor utama dalam hubungan internasional, bangsa-negara, tampak kehilangan kapasitas atau keinginannya untuk mengejar kepentingannya sendiri yang ditafsirkan dalam hal kekuatan. Berbagai komentator dari beragam perspektif teoritis berpendapat bahwa bangsa-negara yang paling maju menganggap diri mereka sendiri sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat internasional. Kerangka kerja teoritis utama bagi pemahaman lingkup internasional, berhubungan dengan kepentingan negara tampak kehilangan kekuatannya. Dibandingkan kepentingan nasional dan negara yang membentuk arah kebijakan, tampak sebuah agenda baru yang ditetapkan oleh aktor non negara” (2007:54).

Di sini kita melihat bahwa seiring dengan perkembangan waktu negara mengalami penurunan kekuatan untuk memenuhi kepentingannya. Penurunan kekuatan tersebut disebabkan karena memang tidak ada aktor hubungan internasional yang benar-benar memiliki kekuatan absolut untuk memenuhi kepentingannya, bahkan kebutuhan yang dimiliki masyarakat internasional.

I.6.2 Organisasi Non Pemerintah (International Non Government Organization)

Bentuk INGO mulai dikenal pada tahun 1846. Yang tercatat sebagai INGO pertama, dalam berbagai literatur, adalah World’s Evangelical Alliance (Perhimpunan Penginjil Sedunia). Kemudian menyusul terbentuknya beberapa INGO lainnya, sejak pertengahan abad ke XIX (sekitar tahun 1860). Berjalan seiring dengan berkembangnya kerjasama internasional dalam bentuk organisasi organisasi internasional antarpemerintah (IGO).

Setelah PD I dan PD II maka banyak INGO terbentuk, seperti juga halnya IGO yang makin digandrungi pada masa itu. Untuk bentuk kerjasama IGO, perkembangan pesat terjadi antara tahun 1921 sampai tahun 1930, dan antara tahun 1941 sampai 1960. Pertikaian antarnegara dan juga perdebatan ideologi dan kepentingan, ternyata cukup berperan dalam menghambat keberhasilan yang ingin dicapai melalui INGO. Dan tidak dapat dipungkiri sepenuhnya bahwa INGO memang telah berusaha berbuat banyak dan cukup bermanfaat dalam menanggulangi berbagai masalah umat manusia serta lingkungan hidup. Namun, perkembangan serta usaha INGO itu bergerak lambat dan kurang terarah (Hurwitz, 2001:29)

I.6.2.1 Definisi INGO

Definisi “internasional NGO” (INGO) pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Februari 1950 bahwa setiap organisasi internasional tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional. *World Bank*, mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting *World Bank, Working With NGOs*, disebutkan, dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintah (Suparni, 1994:17). Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009:1).

Tujuan dari NGO didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia (<http://www.ngo.org/> diakses pada tanggal 25 Okt 2016).

Dari definisi di atas WWF termasuk kategori INGO's (International Non Governmental Organization) dan merupakan organisasi internasional yang bergelut di bidang low politics yakni pada isu lingkungan hidup. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi low politic adalah juga yang merupakan aktivitas yang bersifat fungsional. Organisasi Fungsional adalah suatu organisasi yang didalamnya tidak terlalu menekankan pada hirarki struktural, akan tetapi lebih banyak berdasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang dijalankannya. (Sondang P. Siagian, 1986:125)

I.6.2.2 Jenis-Jenis Non-Governmental Organization (NGO)

Dalam dokumen World Bank (1989), cenderung untuk membedakan antara dua kategori utama dalam NGO, yaitu NGO operasional dan NGO advokasi. Meskipun perbedaan ini jelas menyandang tanda perspektif pembangunan khas *World Bank*, *World Bank* tentu benar dalam asumsi bahwa NGO saat ini berdiri di arena internasional sebagian besar aktif di salah satu atau kedua bidang ini.

Fokusnya adalah terutama pada legitimasi keterlibatan NGO dalam pemerintahan internasional dan pembuatan kebijakan, fungsi operasional dan advokasi dari NGO sangat penting. Ini berarti bahwa fokus utama akan berada di NGO yang terutama berorientasi pada bantuan dan advokasi, sementara banyak dari apa yang akan dikatakan juga berlaku untuk, misalnya organisasi masyarakat sipil sejauh bahwa mereka juga terlibat dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan melalui bantuan dan advokasi. Memiliki atau menjalankan fungsi operasional atau advokasi tidak dianggap sebagai memadai atau bahkan kondisi yang diperlukan untuk menjadi NGO. Namun demikian, berfokus dalam membedakan antara kedua fungsi ini tampaknya penting dilihat dari perspektif legitimasi (Vedder, 2007:5).

Fungsi operasional dari sebuah NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam seperti pengembangan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesejahteraan hewan, konservasi alam dll. Fungsi

advokasi dari NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, badan usaha, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Meskipun mereka tidak langsung berorientasi pada perubahan kondisi nyata realitas, mereka melakukannya dengan mempengaruhi perantara (Vedder, 2007:5).

Semakin banyak NGO terlibat dalam kedua kegiatan operasional dan advokasi. Kadang-kadang, sulit untuk menentukan yang berfungsi kegiatan NGO yang khas. Advokasi kadang-kadang dapat mengambil bentuk tindakan yang sangat nyata dengan tujuan yang sangat spesifik, seperti boikot dan tindak pencegahan. Beberapa kelompok, terutama yang terlibat dalam advokasi, sementara tidak terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program aksi, fokus pada masalah spesifik terkait dengan perubahan konkrit. Dari perspektif legitimasi, kadang-kadang diperlukan untuk menentukan jenis lebih lanjut dari tindakan dan kebijakan dalam fungsi operasional dan advokasi, tergantung pada dampak yang mungkin menguntungkan atau merugikan para pihak yang terlibat (Vedder, 2007:5-6).

Dalam penelitian ini, WWF sebagai subjek penelitian mempunyai fungsi operasional yaitu dalam merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan pada lingkungan hidup seperti perlindungan kesejahteraan hewan dan konservasi alam.

WWF sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan hidup mempunyai misi yaitu untuk melestarikan alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak untuk keanekaragaman kehidupan di Bumi. Sedangkan visi WWF adalah untuk membangun masa depan di mana orang hidup dalam harmoni dengan alam (<http://wwf.panda.org/> diakses pada tanggal 25 Okt 2016).

1.7 Alur Pemikiran



Kerjasama WWF dengan pemerintah Indonesia dalam program mengatasi kepunahan Gajah

I.8 Asumsi

Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga kerangka konseptual yang digunakan, maka dapat ditarik asumsinya yaitu:

- 1 WWF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dalam melaksanakan program kerjanya di Taman Nasional Tesso Nilo prihatin dengan isu-isu lingkungan, terutama kepunahan gajah.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Untuk menunjang penulisan ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu dengan metode pengumpulan data. Data-data yang sudah terkumpul melalui seleksi dan pengelompokkan berdasarkan kebutuhan yang nantinya akan dianalisis. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan yang dapat diartikan secara jelas.

Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan hal ini penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi sesuai dengan data-data yang tersedia di lapangan, masalah yang dimaksud adalah Kasus kepunahan gajah Sumatera. Kemudian penulis juga akan menggambarkan kerjasama yang dilakukan oleh WWF dengan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus

tersebut. Dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, aktual dan akurat mengenai realita, kejadian serta hubungannya.

I.9.2 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan oleh penulis sesuai dengan studikamus yang sedang diteliti, yaitu dengan menggunakan data primer dan datasekunder yang didapatkan melalui hasil riset dilakukan oleh penulis. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, sementara itu data sekunder diperoleh melalui observasi pustaka dari buku-buku (*text book*), laporan kepunahan yang terkait dengan studi kasus, jurnal HI yang bersifat ilmiah, data statistik resmi dari link resmi (WEB atau jurnal) yang telah tervalidasi, serta majalah atau koran pemberitaan lingkungan dan satwa.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dalam suatu isu lingkungan hidup dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

- a. **Data Primer**, Penulis melakukan wawancara yang merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber terkait masalah yang akan diteliti. Salah satu narasumber yang terkait yaitu Pihak WWF-Indonesia yang ada di Jakarta untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan WWF untuk melestarikan populasi Gajah Indonesia.
- b. **Data Sekunder**, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku, jurnal serta karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. yang dilakukan penulis di beberapa perpustakaan yang diantaranya Perpustakaan FISIP

UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jakarta, serta pengumpulan penelitian ilmiah dari berbagai sumber ilmiah lainnya.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Pihak WWF-Indonesia.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II WWF DAN PERMASALAHAN KEPUNAHAN GAJAH DI SUMATERA

Pada bab ini digambarkan secara umum tentang kepunahan gajah di Indonesia dan latar belakang terjalannya kerjasama Indonesia dengan WWF dalam mengatasi isu lingkungan.

BAB III KERJASAMA WWF DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEPUNAHAN GAJAH DI SUMATERA

Pada bab ini diuraikan mengenai peran WWF dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kepunahan Gajah di Sumatera.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian ini sebagai bagian akhir dalam penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna untuk masukan terkait permasalahan tersebut.

